



PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Gloria Yemima Simanjuntak
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Maya Yulika
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Dewi Nopika Putri
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Wahjoe Pangestoeti
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat: Jalan Raya Dompok - Tanjungpinang 29111, Provinsi Kepulauan Riau
Korespondensi penulis: gysimanjuntak@student.umrah.ac.id

Abstrak. *Regional government spending plays a crucial role in driving sustainable economic growth in Indonesia, particularly within the framework of fiscal decentralization. This study analyzes the impact of different expenditure components including direct and indirect expenditures, capital spending, education, and health on economic growth using a quantitative approach based on panel data and time series analysis. The findings reveal that direct and capital expenditures have a positive and significant effect on economic growth. In contrast, indirect spending and social expenditures such as education and health do not exhibit a strong direct impact, although they are still considered crucial for long-term development outcomes. Regional disparities in impact highlight the importance of fiscal capacity and sound budget management. Moreover, the quality of human capital plays a pivotal role in amplifying the effectiveness of public spending in promoting inclusive development. These findings underscore the necessity for regional fiscal reforms that prioritize efficiency, long-term planning, and the integration of infrastructure investment and human capital development.*

Keywords: *regional government spending, economic growth, fiscal efficiency, inclusive development, human capital.*

Abstrak. Belanja pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia, terutama dalam kerangka desentralisasi fiskal. Penelitian ini menganalisis pengaruh berbagai komponen belanja daerah, seperti belanja langsung, tidak langsung, belanja modal, pendidikan, dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data panel dan time series. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja langsung dan belanja modal memberikan dampak positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara belanja tidak langsung serta belanja sosial seperti pendidikan dan kesehatan belum menunjukkan pengaruh langsung yang kuat, meski tetap penting dalam jangka panjang. Perbedaan dampak antarwilayah menyoroti pentingnya kapasitas fiskal dan efektivitas pengelolaan anggaran. Selain itu, kualitas sumber daya manusia berperan penting dalam memperkuat dampak belanja publik terhadap pembangunan inklusif. Implikasi dari temuan ini mengarah pada perlunya reformasi belanja daerah yang menekankan efisiensi, orientasi jangka panjang, serta sinergi antara pembangunan fisik dan penguatan kapasitas manusia.

Kata Kunci: *belanja pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, efisiensi fiskal, pembangunan inklusif, modal manusia*

PENDAHULUAN

Dalam sistem perekonomian, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur, mengarahkan, dan mendorong aktivitas ekonomi demi mencapai tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah adalah untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan nasional. Dalam kerangka desentralisasi fiskal yang berlaku di Indonesia sejak era reformasi, belanja pemerintah daerah menjadi semakin signifikan karena memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola keuangan secara lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Menurut teori ekonomi publik, belanja pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang dapat memengaruhi keseimbangan makroekonomi. Belanja tersebut berfungsi untuk menjalankan tiga fungsi utama pemerintah dalam perekonomian sebagaimana dikemukakan oleh Musgrave, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak disediakan oleh sektor swasta. Fungsi distribusi berkaitan dengan upaya mengurangi ketimpangan pendapatan melalui berbagai bentuk transfer fiskal, sedangkan fungsi stabilisasi bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi makro melalui pengeluaran yang bersifat kontraktif atau ekspansif tergantung pada kondisi ekonomi (Ridwan & Nawir, 2021).

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah daerah dapat menjadi pendorong penting apabila diarahkan pada sektor-sektor produktif. Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki efisiensi ekonomi, serta memperluas kesempatan kerja. Pengaruh belanja publik terhadap pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh jenis pengeluaran, efisiensi anggaran, dan keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, tidak hanya kuantitas belanja yang penting, tetapi juga kualitas dan efektivitas penggunaannya.

Namun, dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam mengelola belanja secara efisien dan efektif. Proporsi belanja yang tinggi untuk keperluan rutin seperti gaji pegawai dan operasional birokrasi sering kali menyisakan ruang yang sempit bagi belanja produktif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa belanja daerah belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di sisi lain, kemampuan fiskal yang terbatas; ketergantungan pada dana transfer dari pusat, serta lemahnya sistem perencanaan dan pengawasan anggaran menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan belanja publik yang berdampak besar bagi pembangunan.

Dengan demikian, penelitian mengenai pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi sangat penting untuk mengevaluasi bagaimana efektivitas alokasi anggaran publik dapat mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata. Penelitian ini diharapkan mampu merumuskan pendekatan pengelolaan fiskal daerah yang lebih adaptif, produktif, dan berorientasi jangka panjang. Upaya ini diharapkan tidak hanya menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah, tetapi juga mendorong transformasi kebijakan keuangan daerah yang berfokus pada keberlanjutan, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif dan ekonometrika. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang

diperoleh dari berbagai sumber resmi, serta publikasi penelitian terdahulu. Teknik analisis yang digunakan meliputi regresi linier berganda, model data panel, dan pendekatan time series seperti VAR dan ARDL, untuk mengkaji pengaruh berbagai komponen belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun regional. Analisis digunakan untuk mengidentifikasi hubungan yang signifikan dan relevansi kebijakan fiskal daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Komponen Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Komponen belanja pemerintah daerah memiliki peranan signifikan dalam memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Studi empiris menunjukkan bahwa jenis belanja seperti belanja langsung, belanja tidak langsung, serta setelah penggolongan belanja yang diperbarui yang kini terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer memiliki korelasi yang kuat dengan perkembangan output ekonomi daerah.

Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Yapen, analisis regresi linier berganda memperlihatkan bahwa baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa belanja langsung berkontribusi positif, dengan koefisien regresi sebesar 1,421, yang berarti peningkatan belanja langsung sebesar 1% akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,421% (Waspada Meliala & Virgilio cancera Meliala, 2024). Sebaliknya, belanja tidak langsung menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar -5,554, namun tetap signifikan secara statistik, yang mengindikasikan bahwa proporsi belanja tidak langsung yang terlalu besar bisa menghambat efektivitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Temuan serupa juga diperkuat oleh penelitian Aulia, Rizky, dan Maulina (2024) yang menganalisis dampak belanja pemerintah pada skala nasional. Hasil mereka menyatakan bahwa dari tiga komponen utama belanja pemerintah yang diteliti; belanja kesehatan, pendidikan, dan modal hanya belanja modal yang secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara dua lainnya tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Hal ini mengimplikasikan bahwa investasi pada aset tetap seperti infrastruktur fisik memiliki efek jangka panjang yang lebih kuat dalam mendorong kapasitas produksi dan produktivitas daerah dibandingkan belanja pada sektor konsumtif atau rutin (Aulia et al., 2024).

Untuk memberikan gambaran kuantitatif atas temuan dari kedua studi tersebut, disajikan ringkasan hasil estimasi pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Pengaruh Komponen Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Jenis Belanja Pemerintah	Lokasi Penelitian	Koefisien Regresi	Signifikansi (p-value)	Pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Belanja Langsung	Kabupaten Kepulauan Yapen	+1,421	0,002	Signifikan Positif
Belanja Tidak Langsung	Kabupaten Kepulauan Yapen	-5,554	0,029	Signifikan Negatif
Belanja Kesehatan	508	-0,00325	0,796	Tidak Signifikan

	Kabupaten/Kota se- Indonesia			
Belanja Pendidikan	508	-0,00019	0,986	Tidak Signifikan
	Kabupaten/Kota se- Indonesia			
Belanja Modal	508	+0,02156	0,018	Signifikan Positif
	Kabupaten/Kota se- Indonesia			

Sumber: Diolah dari Meliala & Meliala (2024) dan Aulia et al. (2024)

Tabel di atas menjelaskan bahwa meskipun belanja pemerintah daerah terdiri dari berbagai komponen, tidak semua jenis belanja memiliki efektivitas yang sama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja langsung dan belanja modal terbukti secara konsisten memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan, sementara belanja rutin seperti belanja tidak langsung, kesehatan, dan pendidikan tidak selalu menunjukkan pengaruh yang menguntungkan secara langsung dan signifikan.

Perbedaan dampak antar komponen belanja ini menunjukkan bahwa pengeluaran yang bersifat investasi jangka panjang cenderung memberikan pengaruh ekonomi yang lebih kuat dibandingkan pengeluaran yang sifatnya operasional atau konsumtif.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa komposisi belanja daerah harus diarahkan secara strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memperbesar alokasi belanja produktif seperti belanja modal, serta mengevaluasi efektivitas belanja rutin agar dapat mengurangi pengeluaran yang kurang produktif. Dengan perencanaan anggaran yang berbasis pada kinerja dan prioritas pembangunan, belanja daerah dapat menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional.

B. Analisis Perbedaan Dampak di Berbagai Wilayah Indonesia

Belanja pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, dampaknya menunjukkan variasi yang signifikan antarwilayah, yang dipengaruhi oleh kapasitas fiskal, efektivitas pengelolaan anggaran, serta struktur ekonomi lokal. Analisis ini membandingkan tiga wilayah utama Sumatera, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara berdasarkan data dan temuan penelitian terbaru.

Studi yang dilakukan oleh Rambe dan Febriani (2020) mengungkap bahwa belanja pemerintah dan pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Sumatera. Penelitian ini menggunakan model data panel dengan pendekatan efek tetap (Fixed Effect Model) terhadap 154 kabupaten/kota selama periode 2011 hingga 2016. Namun demikian, fenomena pemekaran wilayah (regional split) justru berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Daerah hasil pemekaran cenderung menunjukkan performa ekonomi yang lebih rendah, diduga akibat belum optimalnya pengelolaan fiskal dan lemahnya kapasitas institusional di daerah baru (Rambe & Febriani, 2020).

Ronni, Nugroho, Bancin, dan Christmas (2024) meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di

Kalimantan Tengah dengan menggunakan data panel dari 14 kabupaten/kota selama 2017-2022. Hasilnya menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja pemerintah daerah, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Namun, terhadap kecenderungan alokasi belanja lebih banyak digunakan untuk belanja operasional dibandingkan belanja modal. Tren ini berpotensi menghambat pembangunan jangka panjang karena kurangnya investasi pada sektor produktif (Ronni et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Rasjid, Masinambow, dan Niode (2021) selama periode 2005 hingga 2017 di Sulawesi Utara menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah dan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Analisis regresi linier berganda yang digunakan menunjukkan bahwa belanja modal yang diarahkan pada pembentukan aset tetap dan infrastruktur memiliki dampak besar terhadap peningkatan produktivitas daerah. Sementara itu, investasi dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan jika dianalisis secara parsial (Rasjid et al., 2021).

Tabel berikut menyajikan ringkasan perbandingan dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi antarwilayah berdasarkan temuan studi:

Tabel 2. Perbandingan Dampak Regional

Wilayah	Periode Data	Metode Analisis	Variabel Signifikan	Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Sumatera	2011-2016	Fixed Effect Model	Belanja Pemerintah, Pajak Daerah	Positif dan signifikan; daerah pemekaran negatif
Kalimantan Tengah	2017-2022	WarpPLS (data panel)	PAD, Dana Perimbangan	Positif; belanja dominan operasional
Sulawesi Utara	2005-2017	Regresi Linier Berganda	Belanja Modal, Tenaga Kerja	Positif dan signifikan; PMDN dan PMA tidak signifikan

Analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan satu kebijakan fiskal nasional tidak akan efektif jika tidak mempertimbangkan kondisi regional. Daerah seperti Sumatera dan Sulawesi yang memiliki struktur ekonomi dan kapasitas fiskal berbeda memerlukan strategi spesifik dalam alokasi belanja pemerintah. Pemerintah pusat perlu mendorong desentralisasi fiskal yang lebih adaptif serta memperkuat tata kelola PAD agar daerah tidak bergantung sepenuhnya pada transfer pusat.

Pendekatan Panel Data dan Time Series

Pendekatan panel data memungkinkan peneliti menganalisis dinamika pertumbuhan ekonomi antar daerah dan waktu secara bersamaan. Widiastuti dan Sutrischastini (2022) menggunakan model panel data untuk mengkaji pengaruh belanja pemerintah dan variabel fiskal lainnya di 33 provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah secara total tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi berpengaruh positif terhadap pendapatan per kapita. Sebaliknya, belanja modal, belanja pegawai, dan belanja barang/jasa secara signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, baik dalam bentuk absolut maupun rasio terhadap PDRB (Widiastuti & Sutrischastini, 2022).

Hasil yang berbeda ditemukan oleh Rambe dan Febriani (2020), yang meneliti 154 kabupaten dan kota di wilayah Sumatera pada periode 2011-2016. Mereka menggunakan pendekatan panel data dengan model efek tetap (fixed effect model). Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah dan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, variabel pemekaran wilayah menunjukkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Rambe & Febriani, 2020).

Tabel 3. Hasil Ringkasan Penelitian Pendekatan Panel Data

Peneliti	Unit Analisis	Metode Estimasi	Hasil Utama
Widiastuti & Sutrischastini (2022)	33 provinsi (2010-2020)	Pooled Least Square	Belanja total tidak signifikan terhadap pertumbuhan, tapi positif ke pendapatan per kapita.
Rambe & Febriani (2020)	154 Kab/Kota di Sumatera (2011-2016)	Fixed Effect Model	Belanja dan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pendekatan time series digunakan untuk menangkap hubungan jangka pendek dan panjang antar variabel makroekonomi secara agregat. Praycilia dan Sugiyanto (2021) menggunakan data tahunan Indonesia dari 1990 hingga 2019 untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah pusat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pendekatan Vector Autoregression (VAR) dan Error Corection Model (ECM), ditemukan bahwa belanja pemerintah pusat berpengaruh positif signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB), baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di sisi lain, utang luar negeri memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap PDB (Praycilia & Sugiyanto, 2021).

Najmi et al. (2024) juga menggunakan pendekatan time series dalam model ARDL (Autoregressive Distributed Lag) dengan data tahunan dari tahun 1972 hingga 2021. Mereka menemukan bahwa belanja pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan rumah tangga dalam jangka pendek dan panjang, yang secara tidak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan (Najmi et al., 2024).

Tabel 4. Hasil Ringkasan Penelitian Pendekatan Time Series

Peneliti	Periode Data	Metode	Hasil Utama
Praycilia & Sugiyanto (2021)	1990-2019	VAR, ECM	Belanja pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDB.
Najmil et al. (2024)	1972- 2021	ARDL	Belanja pemerintah meningkatkan pendapatan rumah tangga secara signifikan.

Hasil dari kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa kualitas dan komposisi belanja pemerintah lebih penting daripada jumlah total belanja itu sendiri. Belanja yang diarahkan pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan memiliki efek pengganda yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tingkat daerah, penguatan kapasitas fiskal dan manajemen anggaran daerah menjadi kunci agar kebijakan fiskal memiliki dampak optimal terhadap pertumbuhan.

Selain itu, hasil dari pendekatan time series mengingatkan bahwa meskipun belanja pemerintah pusat dapat meningkatkan PDB, peningkatan utang luar negeri perlu dikendalikan agar tidak menurunkan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Oleh karena itu, kombinasi optimal antara alokasi belanja, efisiensi fiskal, dan pengendalian defisit sangat diperlukan dalam mendesain kebijakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kaitan antara Belanja Pemerintah dan Pendapatan Per Kapita

Salah satu indikator dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah adalah meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. belanja pemerintah daerah, sebagai bagian dari kebijakan fiskal, memiliki peran sentral dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif, yang secara langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi pendapatan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti dan Sutrischastini (2022) menggunakan pendekatan data panel dari 33 provinsi di Indonesia selama periode 2011-2016. dengan menggunakan metode pooled least squares, mereka menemukan bahwa belanja pemerintah daerah dalam berbagai bentuk (total, per kapita, dan sebagai proporsi terhadap PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita, meskipun tidak selalu mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Hasil estimasi model 1.2.1 menunjukkan bahwa belanja pemerintah total memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan per kapita baik pada tahun berjalan (lag 0) maupun dua tahun sebelumnya (lag 2). Artinya, realisasi anggaran pemerintah daerah memiliki dampak jangka pendek dan jangka menengah terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, dalam model 1.2.2, belanja pemerintah per kapita juga terbukti secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita. Koefisien regresi yang tinggi menunjukkan bahwa semakin besar alokasi belanja daerah yang diperhitungkan per individu, maka semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh penduduk rata-rata di suatu daerah.

Hal yang sama juga ditemukan pada model 1.2.3, dimana rasio belanja pemerintah terhadap PDRB (share government expenditure to GRDP) memiliki efek positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita, baik pada tahun berjalan maupun satu tahun sebelumnya. Hasil ini menegaskan bahwa efisiensi belanja fiskal bukan hanya persoalan kuantitas, tetapi juga keberhasilan dalam mengarahkan alokasi tersebut pada sektor produktif (Widiastuti & Sutrischastini, 2022).

Tabel 5. Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Pendapatan Per Kapita

Model	Variabel Independen	Pengaruh terhadap Pendapatan Per Kapita	Signifikansi Statistik
Model 1.2.1	Belanja Pemerintah	Positif (lag 0 dan lag 2)	Signifikan
Model 1.2.2	Belanja Pemerintah Per Kapita	Positif (lag 0)	Signifikan

Model 1.2.3	Share Pemerintah PDRB	Belanja terhadap	Positif (lag 0 dan lag 1)	Signifikan
-------------	-----------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------

Sumber: Widiastuti & Sutrischastini (2022)

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah dapat menjadi instrumen strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan per kapita. Pemerintah daerah yang secara konsisten meningkatkan dan mengarahkan belanjanya ke sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan dasar, cenderung menciptakan multiplier effect yang lebih besar terhadap ekonomi lokal.

Oleh karena itu, efisiensi dan efektivitas anggaran daerah menjadi krusial agar kebijakan fiskal dapat mendorong kesejahteraan dan tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan agregat semata.

Keterkaitan Belanja Pemerintah dengan Aspek Sosial Ekonomi Lainnya

Belanja pemerintah daerah memiliki hubungan erat dengan berbagai aspek sosial ekonomi, seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pembangunan manusia, dan pertumbuhan industri. Dalam konteks nasional maupun daerah, pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui belanja bersifat produktif dan tepat sasaran.

Secara empiris, peningkatan belanja pemerintah baik dalam bentuk belanja langsung maupun tidak langsung terbukti signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Studi di kabupaten Kepulauan Yapen menunjukkan bahwa belanja langsung memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun dalam arah yang berbeda (Waspada Meliala & Virgilio cancera Meliala, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa struktur dan jenis belanja memengaruhi arah dan kekuatan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi.

Secara pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah juga memiliki dampak sosial, khususnya dalam pengentasan kemiskinan. Temuan dari penelitian nasional menunjukkan bahwa belanja pemerintah berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah tangga baik jangka pendek maupun panjang, yang secara langsung berimplikasi terhadap penurunan tingkat kemiskinan (Najmi et al., 2024). Artinya belanja pemerintah yang diarahkan ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mampu memberikan manfaat sosial ekonomi yang luas.

Lebih jauh, kualitas belanja pemerintah menjadikan faktor kunci. Sebagaimana dikemukakan dalam studi Najmi et al. (2024), belanja pemerintah hanya akan efektif jika mampu menjangkau kelompok rentan dan digunakan untuk memperluas akses terhadap pelayanan dasar. Belanja sosial dan infrastruktur yang tidak merata justru berpotensi memperbesar ketimpangan dan gagal dalam mengatasi kemiskinan secara struktural.

Dari sudut Najmi et al. (2024), belanja pemerintah hanya akan dialokasikan secara efisien jika diarahkan untuk memperkuat indeks pembangunan manusia (IPM). Melalui peningkatan pada sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (Waspada Meliala & Virgilio cancera Meliala, 2024).

Dengan demikian, keterkaitan belanja pemerintah terhadap aspek sosial ekonomi tidak hanya sebatas pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi kesejahteraan yang lebih luas. Oleh karena itu, kebijakan fiskal pemerintah daerah seharusnya tidak hanya pemerataan, keadilan sosial, dan pembangunan manusia berkelanjutan.

Implikasi Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Jangka Panjang

Kebijakan fiskal merupakan satu instrumen utama pemerintah dalam mengarahkan perekonomian menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui pengaturan belanja dan penerimaan negara, kebijakan fiskal berperan dalam menjaga stabilitas makroekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, berbagai studi menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang signifikan (Praycilia & Sugiyanto, 2021).

Hasil analisis dengan model VAR dan ECM yang digunakan oleh Praycilia dan Sugiyanto (2021) menunjukkan bahwa belanja pemerintah pusat non-utang dan penerbitan surat berharga negara (SBN) berpengaruh positif pemerintah dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Artinya alokasi belanja yang tepat, khususnya pada sektor-sektor produksi nasional secara berkelanjutan.

Sebaliknya, pembiayaan melalui utang luar negeri menunjukkan pengaruh negatif terhadap PDB, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Hal ini mencerminkan risiko kebijakan fiskal yang tidak berkelanjutan apabila ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri terlalu tinggi. Beban bunga utang dan potensi pelemahan fiskal akibat tekanan pembayaran dapat menghambat kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dalam jangka panjang.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Frieria et al (2024), belanja pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur juga menunjukkan bahwa efektivitas belanja fiskal sangat tergantung pada kualitas alokasinya. Belanja yang tidak di arahkan pada investasi publik atau yang terlalu besar dialokasikan pada belanja rutin kurang produktif cenderung tidak memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan fungsi alokasi dalam belanja daerah menjadi krusial dalam mendukung agenda pertumbuhan yang inklusif dan berkesinambungan (Frieria et al., 2024).

Implikasi kebijakan dari temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal yang hati-hati dan berorientasi jangka panjang sangat diperlukan. Pemerintah perlu memperhatikan prinsip fiskal sustainability, yang mensyaratkan bahwa kebijakan fiskal harus dijalankan tanpa meningkatkan beban utang secara berlebihan dan mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan di masa depan (Praycilia & Sugiyanto, 2021). Hal ini juga sejalan dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menetapkan batas defisit anggaran maksimum sebesar 3% dari PDB dan rasio utang tidak lebih dari 60% terhadap PDB.

Dengan demikian, dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang, kebijakan fiskal harus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan stabilitas ekonomi mikro, dan memelihara keberlanjutan fiskal negara. Konsistensi antara kebijakan belanja dan strategi pembiayaan menjadi kunci keberhasilan kebijakan fiskal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil.

Efisiensi dan Efektivitas Belanja Pemerintah Daerah

Efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah daerah merupakan dua aspek kunci dalam menentukan sejauh mana alokasi anggaran publik mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya publik dengan biaya minimum untuk mencapai output tertentu, sedangkan efektivitas berhubungan dengan sejauh mana output tersebut berdampak terhadap tujuan pembangunan yang diinginkan, termasuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Meliala (2024) di Kabupaten Kepulauan Yapen menunjukkan bahwa baik belanja langsung maupun tidak langsung berpengaruh signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja langsung, yang mencakup pengeluaran untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan. Sebaliknya, belanja tidak langsung seperti gaji pegawai atau belanja rutin, justru menunjukkan hubungan negatif, menandakan rendahnya efisiensi dalam penggunaan dana tersebut untuk mendorong produktivitas ekonomi.

Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh Ronni et al. (2024) di Kalimantan Tengah. Meskipun terdapat alokasi belanja yang cukup besar dari Dana Perimbangan, banyak daerah justru menunjukkan dominasi belanja operasional dibanding belanja modal. Grafik rasio belanja daerah menunjukkan tren penurunan belanja modal dari tahun ke tahun, yang berimplikasi pada rendahnya efektivitas belanja dalam mendukung pertumbuhan jangka panjang. Ketergantungan tinggi pada belanja rutin dinilai tidak memberikan kontribusi berarti terhadap produktivitas daerah.

Tabel 6. Rasio Operasional dan Modal terhadap Total Belanja Daerah (Kalimantan Tengah)

Kabupaten/Kota	Belanja Operasional 2020 (%)	Belanja Modal 2020 (%)	Belanja Operasional 2022 (%)	Belanja Modal 2022 (%)
Kotawaringin Barat	49,48	41,03	70,45	17,36
Barito Timur	54,98	11,31	69,71	12,20
Kotawaringin Timur	50,24	29,14	68,53	21,32
Seruyan	59,93	13,85	74,98	22,61

Tabel di atas menunjukkan tren penurunan alokasi belanja modal pada beberapa kabupaten, yang disertai dengan peningkatan belanja operasional. Ketidakseimbangan ini mencerminkan alokasi anggaran yang belum optimal untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Alokasi belanja yang terlalu fokus pada operasional tanpa memperhatikan investasi publik strategis akan memperlemah potensi pertumbuhan jangka panjang.

Untuk meningkatkan efisiensi, daerah perlu melakukan reformasi belanja dengan menyeimbangkan kembali proporsi belanja modal dan belanja operasional. Sedangkan efektivitas belanja akan meningkat bila pengeluaran diarahkan ke sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang terbukti memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Waspada Meliala & Virgilio canera Meliala, 2024).

Lebih jauh, efisiensi dan efektivitas belanja juga dipengaruhi oleh kemampuan fiskal daerah. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan prioritas pengeluaran. Oleh karena itu, penguatan PAD dan pengelolaan Dana Perimbangan yang akuntabel menjadi fondasi bagi terciptanya sistem belanja daerah yang produktif (Ronni et al., 2024).

Peran Modal Manusia sebagai Faktor Penguat Dampak Belanja Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah pada fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, besarnya kontribusi seluruh variabel tersebut terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif (IPEI) hanya sebesar 47% (Safitri, 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain yang turut menentukan keberhasilan pencapaian pertumbuhan ekonomi inklusif, salah satunya adalah kualitas sumber daya manusia atau yang disebut sebagai modal manusia.

Modal manusia memainkan peran penting sebagai penguat efektivitas belanja pemerintah daerah. Peningkatan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan tidak akan maksimal jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan produktivitas masyarakat. Misalnya, meskipun belanja pendidikan menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap IPEI, dampak sesungguhnya baru akan terasa jika hasil dari belanja tersebut benar-benar meningkatkan angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, dan mutu lulusan yang mampu berkontribusi secara aktif dalam perekonomian lokal.

Begitu pula dengan belanja kesehatan. Meskipun memiliki kontribusi terbesar terhadap variansi IPEI dalam jangka panjang, manfaat optimalnya baru tercapai apabila alokasi anggaran diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga medis, infrastruktur pelayanan kesehatan, serta efektivitas program seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan demikian, belanja kesehatan tidak hanya menjamin akses, tetapi juga kualitas hidup masyarakat sebagai modal dasar pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Safitri, 2021).

Modal manusia menjadi penting karena pembangunan ekonomi yang inklusif mensyaratkan keterlibatan aktif masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Ketika masyarakat sehat, berpendidikan, dan memiliki keterampilan, mereka akan lebih mampu memanfaatkan peluang yang muncul dari pembangunan infrastruktur atau program pemberdayaan ekonomi yang digagas pemerintah. Dalam konteks ini, modal manusia berperan sebagai penghubung antara belanja pemerintah dan hasil pembangunan yang merata.

Peningkatan alokasi belanja publik harus diikuti dengan upaya serius untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah disarankan untuk mengarahkan belanja pada program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kapasitas individu, seperti pelatihan, beasiswa, pelayanan kesehatan dasar, serta reformasi kurikulum dan metode pembelajaran. Dukungan dari pemerintah pusat juga diperlukan agar penguatan SDM menjadi prioritas bersama dalam kerangka desentralisasi fiskal.

Dengan memperkuat modal manusia, efektivitas belanja pemerintah akan meningkatkan dan pertumbuhan ekonomi inklusif dapat tercapai secara lebih optimal. Oleh karena itu, peran modal manusia tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi justru menjadi penguat utama dalam memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah mampu memberi dampak luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dampak Kualitas Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Produktif

Belanja modal daerah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pelaksanaannya. Realisasi anggaran yang sekedar mengejar serapan tinggi, terutama di akhir tahun anggaran, kerap mengabaikan asas manfaat dan efisiensi. Contohnya adalah pembongkaran infrastruktur yang masih layak pakai atau pembangunan fasilitas yang tidak tepat guna, yang justru memicu inflasi tanpa menambah nilai ekonomi.

Rendahnya kualitas belanja juga tercermin dari ketimpangan alokasi wilayah. Belanja modal yang hanya terpusat di perkotaan menyebabkan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Padahal, pemerataan belanja dapat memperluas akses dan produktivitas ekonomi di daerah tertinggal.

Selain itu, data menunjukkan bahwa realisasi belanja modal pada 2024 baru mencapai 42,99%, jauh lebih rendah dibanding belanja operasional (Subekan, 2025). Kondisi ini menunjukkan minimnya prioritas pada pengeluaran produktif.

Agar belanja modal benar-benar mendorong pertumbuhan, pemerintah daerah perlu fokus pada proyek yang berkelanjutan, merata, dan berorientasi pada hasil. Kualitas, bukan sekedar kuantitas belanja, adalah kunci bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Belanja Pemerintah sebagai Instrumen Fiskal untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Belanja pemerintah daerah merupakan instrumen fiskal yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif. Berdasarkan hasil estimasi model efek tetap (*fixed effects*) yang digunakan dalam penelitian Wardhana et al. (2021), seluruh kategori pengeluaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), sebagai indikator utama kualitas sumber daya manusia yang inklusif. Variabel belanja pendidikan memiliki koefisien tertinggi, menunjukkan bahwa investasi di sektor ini memberikan dampak paling besar terhadap peningkatan kualitas manusia dan produktivitas ekonomi (Wardhana et al., 2021).

Pendidikan memungkinkan peningkatan kemampuan produktif individu, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta memperkuat daya saing wilayah. Temuan ini didukung oleh hasil penelitian Setiawan dan Fikriah (2022) yang menyatakan bahwa belanja pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPM di 34 provinsi Indonesia. Dengan menggunakan model regresi data panel, penelitian ini menguatkan bahwa fungsi alokasi belanja publik yang diarahkan pada pengembangan manusia berdampak nyata pada indikator kesejahteraan regional (Setiawan & Fikriah, 2020).

Selain itu, belanja di bidang infrastruktur dan ekonomi juga ditemukan signifikan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Infrastruktur berperan sebagai fondasi penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi. Infrastruktur seperti listrik, air bersih, dan jalan memiliki pengaruh besar dalam mendorong peningkatan IPM, terutama di wilayah non-perkotaan. Infrastruktur mendukung distribusi layanan dasar dan integrasi antarwilayah, yang sangat penting dalam menciptakan pertumbuhan yang merata.

Secara keseluruhan, pengeluaran fiskal yang diarahkan pada sektor-sektor esensial terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah harus disertai dengan perencanaan belanja yang berbasis kinerja dan berorientasi pada pengurangan kesenjangan antarwilayah. Efektivitas belanja publik sebagai alat intervensi fiskal juga dipengaruhi oleh akuntabilitas dan tata kelola anggaran, terutama dalam menjamin bahwa dana yang dibelanjakan benar-benar menjangkau kelompok rentan dan memperluas kesempatan ekonomi (Wulandari, 2020).

Belanja pemerintah daerah bukan hanya instrumen fiskal makroekonomi, tetapi juga katalis penting dalam memperkuat pemerataan pembangunan. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan belanja pemerintah harus diiringi dengan perbaikan kualitas belanja, distribusi yang adil antarwilayah, serta pengawasan yang kuat untuk mencegah kebocoran anggaran.

KESIMPULAN

Belanja pemerintah daerah terbukti memiliki kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya jika dialokasikan secara strategis ke sektor produktif. Komponen belanja seperti belanja langsung dan belanja modal memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara belanja tidak langsung,

pendidikan, dan kesehatan belum menunjukkan pengaruh langsung yang kuat, meski tetap esensial dalam jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Variasi dampak antarwilayah menekankan pentingnya kapasitas fiskal dan efektivitas pengelolaan anggaran dalam keberhasilan pembangunan daerah. Wilayah yang masih mendominasi belanja operasional cenderung memiliki pertumbuhan yang stagnan dibandingkan daerah yang mampu memprioritaskan belanja modal dan infrastruktur dan investasi jangka panjang. Ketidakseimbangan ini menunjukkan urgensi informasi penganggaran daerah, khususnya dalam mengarahkan lebih banyak dana ke sektor produktif dan pembangunan manusia.

Selain faktor fiskal, modal manusia berperan sebagai penguat utama efektivitas belanja pemerintah daerah. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan hanya akan optimal jika diiringi dengan peningkatan kualitas SDM, termasuk akses terhadap layanan dasar, kompetensi tenaga kerja, dan partisipasi masyarakat dalam ekonomi lokal. Kualitas belanja lebih penting daripada kuantitas semata.

Implikasi kebijakan yang muncul adalah pentingnya perencanaan fiskal jangka panjang yang menyeimbangkan efisiensi dan efektivitas belanja publik. Pemerintah daerah perlu fokus pada penguatan PAD, efisiensi alokasi anggaran, dan pengelolaan utang yang hati-hati agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga. Pemerintah pusat juga perlu mendukung melalui kebijakan desentralisasi yang adaptif serta peningkatan akuntabilitas dan tata kelola fiskal.

Dengan demikian, belanja pemerintah daerah harus tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi agregat, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat dan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, W., Rizky, F., & Maulina, R. (2024). Pertumbuhan Ekonomi: Ditinjau Dari Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan, dan Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah. *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 20. <https://doi.org/10.35308/akbis.v8i1.9220>
- Friera, A., Silaban, E., Sugara, W. H., Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, M. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021). *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(1), 25–32. <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i1.1486>
- Najmi, I., Hasrina, C. D., Asmawati, A., & Ansari, R. (2024). Belanja Pemerintah, FDI, Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Industri, dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 12(1), 167–183. <https://doi.org/10.21002/jepi.2024.11>
- Praycilia, E., & Sugiyanto, F. (2021). Analisis Pengaruh Defisit Anggaran, Belanja Pemerintah Pusat, dan Utang Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1990-2019. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(3), 184–207.
- Rambe, R. A., & Febriani, R. E. (2020). Peran Belanja Pemerintah dan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Sumatera. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 57–76. https://www.researchgate.net/profile/Roosemarina-Rambe-2/publication/344545598_Peran_Belanja_Pemerintah_dan_Pajak_terhadap_Pertumbuhan_Ekonomi_Kabupaten_dan_Kota_di_Sumatera/links/5f7f3231a6fdccfd7b

- Rasjid, F., Masinambow, V. ecky A. J., & Niode, A. O. (2021). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1175–1185. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32921>
- Ridwan, & Nawir, I. S. (2021). Buku Ekonomi Publik. In S. T. A. Muhammad Fadhil Ridwan (Ed.), *Pustaka Pelajar* (Cetakan I). Pustaka Pelajar. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Ronni, H., Nugroho, S., Bancin, J. B., & Christmas, A. F. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Terhadap Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Tengah*.
- Safitri, M. I. D. (2021). Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85–96. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.339>
- Setiawan, A., & Fikriah. (2020). Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Syiah Kuala*, 5(4), 212–221. <http://eprint.stieww.ac.id/1110/1/22> Rolanda Aisha Hidarini dan Andy Dwi Bayu Bawono.pdf
- Subekan, A. (2025). *Optimizing State / Regional Budget Realization for National Economic Growth Optimalisasi Realisasi Anggaran Negara / Daerah bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. 2(1), 147–160.
- Wardhana, A., Kharisma, B., & Sulandari, D. S. (2021). *Belanja Pemerintah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Indonesia*. 5(2), 1–9.
- Waspada Meliala, & Virgilio cancera Meliala. (2024). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012-2022. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 1(2), 321–332. <https://doi.org/10.61132/keat.v1i2.451>
- Widiastuti, N., & Sutrischastini, A. (2022). Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Studi Kasus Data Panel Provinsi Di Indonesia. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 30(2), 1–16. <https://doi.org/10.32477/jkb.v30i2.394>
- Wulandari, A. A. (2020). *ANALISIS EKONOMISASI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG*. 7(1), 71–82.